

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Organisasi merupakan suatu wadah kegiatan sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Setiap organisasi baik pemerintahan maupun swasta, dalam kegiatan operasionalnya senantiasa membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mampu melaksanakan tugasnya, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Organisasi dapat terbentuk karena adanya penyatuan visi misi serta tujuan yang sama dan didalam prakteknya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Unsur utama yang memegang peran penting untuk mencapai tujuan organisasi, terutama organisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat ditentukan oleh manusia yang menjadi anggota organisasi tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pemantauan serta evaluasi perencanaan, kebutuhan, pengadaan dan distribusi, pemanfaatan dan pengamanan di bidang keuangan dan Barang Milik Daerah (BMD).

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan penggabungan tugas dan fungsi dari Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah provinsi Jawa Barat.

Peran dan fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Jawa Barat ini mempunyai 4 fungsi bidang dalam menjalankan tupoksinya yaitu:

1. Bidang Anggaran
2. Bidang Perbendaharaan
3. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
4. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Terbentuknya Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dan akuntabilitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan pelayanan evaluasi APBD. Tujuan yang paling berpengaruh langsung terhadap

masyarakat yaitu menjaga kekayaan aset yang dimiliki provinsi Jawa Barat dari hak kepemilikan warga negara asing (WNA).

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat lima kali berturut-turut mendapatkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri keuangan karena laporan keuangan Provinsi Jawa Barat memiliki kualitas yang terbaik. Tetapi dalam hal pengelolaan aset, pemerintah harus lebih bekerja keras dalam mencari data yang terlihat masih kurang informasi mengenai jumlah aset yang masih banyak belum terdata dan tersertifikasi.

Pengelolaan aset yang tidak berjalan dengan baik, akan memberi dampak pada melemahnya pencapaian PAD (Pendapatan Asli Daerah) serta kinerja laporan keuangan daerah. Secara umum terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi hampir semua pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan aset daerah, seperti inventarisasi, penilaian, penatausahaan dan pelaporan yang belum efektif. Di samping itu, pembukuan penambahan aset, dan pemanfaatan juga belum optimal, serta masih rendahnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan dalam menyelenggarakan pengelolaan aset dan pembangunan daerah ditentukan dengan memiliki sistem informasi yang jelas dan akurat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian sistem informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi pengelolaan aset agar dapat menghasilkan

pekerjaan yang optimal yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi mengenai aset dan melakukan validasi terhadap informasi yang dimiliki.

Berdasarkan hasil peninjauan yang dilakukan peneliti di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat, Peneliti menemukan permasalahan belum optimalnya manajemen aset permasalahan tersebut dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut:

1. Inventarisasi Aset, yang dimiliki oleh pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat masih rendah. Dapat dilihat dari kurangnya pengawasan dan pengendalian pegawai mengenai tugas pokok dan fungsi dari pekerjaannya masing-masing
2. Optimalisasi Aset, kurang baiknya pengembangan dan pemanfaatan pada aset daerah.

Berdasarkan permasalahan di atas, optimalisasi manajemen aset yang masih rendah diduga disebabkan salah satunya oleh sistem informasi yang tidak sesuai dengan indikator-indikator berikut:

1. Manusia yang melaksanakan pengolahan data yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat masih belum menunjukkan pengembangan sistem informasi yang dimiliki.
2. Basis data yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat kurang baik karena masih adanya data yang belum tersedia.

Menyadari adanya pengaruh Sistem Informasi terhadap manajemen aset. Sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokkan, diproses menjadi informasi, dan pendistribusian berkaitan dengan pengelolaan aset suatu daerah. Pencapaian manajemen aset yang optimal tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah informasi yang dimiliki. Maka dari itu, diperlukan sistem informasi untuk mengetahui dan melakukan keputusan setiap tindakan instansi dengan yang telah dimiliki oleh seorang Pegawai mengenai informasi aset daerah.

Berdasarkan pemahaman tersebut diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset dalam rangka usulan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.”**

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh sistem informasi Informasi terhadap Manajemen Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Seberapa besar pengaruh sistem informasi diukur melalui *hardware* dan *software*, komunikasi, manusia dan basis data terhadap Manajemen Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat?

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penjajagan ini dilakukan dalam rangka memperoleh data yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menemukan adanya pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui seberapa pengaruh sistem informasi diukur melalui *hardware* dan *software*, komunikasi, manusia dan basis data terhadap Manajemen Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Mengembangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian terdiri dari kegunaan teoritis yang berdasarkan pertimbangan kontekstual dan konseptual, dan kegunaan praktis untuk perbaikan bagi lembaga yang bersangkutan, kegunaan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a) Kegunaan Bagi Akademik

Sebagai bahan bacaan dan referensi dalam bentuk karya tulis bagi mahasiswa/i Fisip Unpas dalam mengkaji mengenai pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset.

b) Kegunaan Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pemahaman bagi peneliti tentang pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Instansi Pemerintah

Dapat dijadikan bahan evaluasi dan sebagai masukan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dalam pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat

b) Bagi Masyarakat

Sebagai rujukan dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat untuk lebih mengetahui mengenai pengaruh Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat.